

# BAB I

## PENDAHULUAN

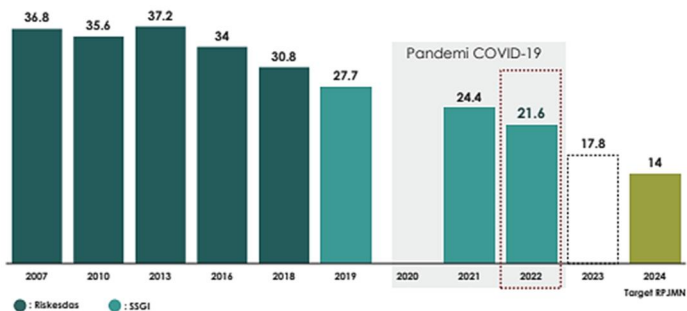
### 1.1 Latar Belakang

Isu stunting telah menjadi perhatian utama dalam ranah kesehatan di berbagai negara, termasuk Indonesia. Tantangan yang dihadapi oleh negara ini dalam menangani kasus stunting merupakan suatu kompleksitas yang memerlukan perhatian khusus dan tindakan strategis. Stunting merupakan kondisi dimana secara fisik anak lebih pendek dibandingkan rata-rata tinggi badan anak seusianya, sebagai akibat dari kekurangan gizi kronis. Menurut World Health Organization (2015), stunting adalah gangguan tumbuh kembang yang dialami anak akibat gizi buruk, infeksi berulang, dan stimulasi psikososial yang tidak memadai. Stunting dapat terjadi sejak janin masih di dalam kandungan dan baru tampak ketika anak berusia dua tahun. Balita yang mengalami stunting akan mengalami penurunan tingkat kognitif, kerentanan terhadap penyakit, serta beresiko mengalami penurunan tingkat produktivitas di masa mendatang. Secara luas stunting akan mempengaruhi terhambatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kemiskinan, serta memperluas ketimpangan.

Melalui Buku Indeks Khusus Penanganan Stunting (IKPS) yang dipublikasikan di website [stunting.go.id](http://stunting.go.id) pada 8 Juni 2023 menyampaikan bahwa stunting merupakan ancaman serius bagi Indonesia untuk dapat ‘menikmati’ bonus demografi di tahun 2030. Bonus demografi adalah populasi penduduk yang produktif (usia kerja) jauh lebih banyak ketimbang penduduk yang tidak produktif. Bonus demografi ini akan berdampak baik pada peningkatan kesejahteraan Indonesia jika sumber daya manusia memiliki kapasitas yang unggul. Namun kesempatan emas ini bisa gagal dimanfaatkan jika stunting tidak segera dicegah.

UN SDGs 2023 Summit di New York, Amerika Serikat pada September 2023 lalu menyatakan, di tingkat global, hanya 15 persen target TPB/SDGs yang berstatus *on track*. *Asia and the Pacific SDG Progress Report 2023* menjabarkan, progres pencapaian TPB/SDGs di regional Asia Pasifik baru mencapai 14,4 persen pada 2022 sehingga diperlukan 42 tahun lagi atau 2065 untuk mencapai target-target

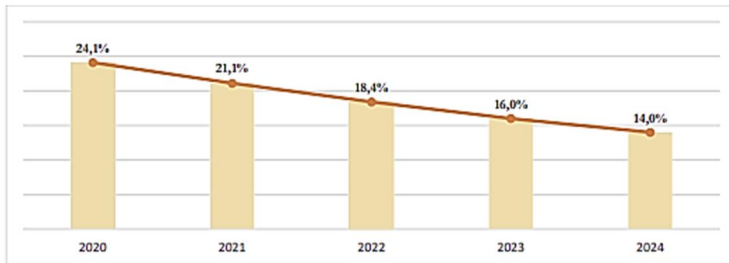
TPB/SDGs. Berdasarkan *Sustainable Development Report 2023*, Indonesia meraih peringkat ke-75 dunia, naik dari peringkat 102 pada 2019. Hal ini sejalan dengan skor indeks SDGs Indonesia yang terus meningkat dari 64,2 pada 2019 menjadi 70,2 pada 2023. Meskipun Indonesia telah mencapai kemajuan signifikan dalam berbagai sektor pembangunan, prevalensi stunting yang tinggi masih menjadi tantangan yang perlu diatasi.



**Gambar 1.1** Angka Prevalensi Balita Stunting di Indonesia

Sumber : Riset Kesehatan Dasar (2007, 2010, 2013, 2018), Pemantauan Status Gizi (2015, 2016, 2017), Studi Status Gizi Balita Indonesia (2019, 2021, 2022)

Gambar 1.1 menunjukkan bahwa secara tren, tingkat prevalensi menunjukkan penurunan dari 36,8% di tahun 2007 menjadi 24,4% di tahun 2021. Jika dilihat dari tahun ke tahun, tingkat prevalensi stunting cenderung fluktuatif, hal tersebut terlihat pada periode 2017-2013 yang mengalami peningkatan, kemudian menurun pada periode 2013-2016, dan kembali naik pada periode 2016-2018, yang selanjutnya terus menurun pada periode 2018-2021. Namun tingkat prevalensi tersebut masih berada di atas standar WHO yang menetapkan ambang batas prevalensi stunting sebesar 20%.

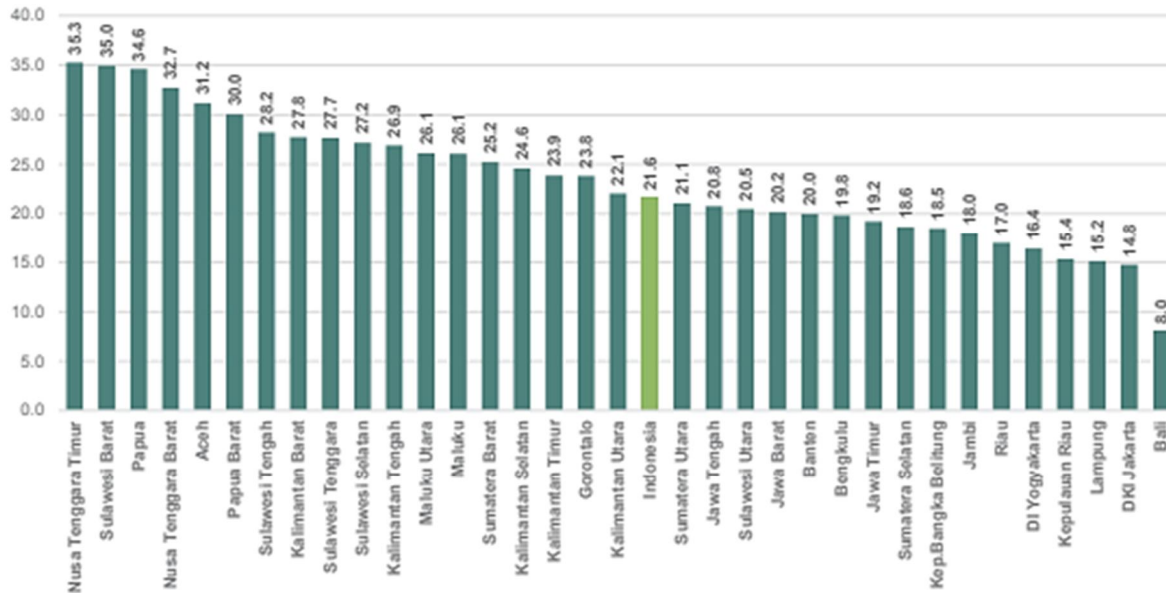


Sumber: Proyek Prioritas Strategis RPJMN 2020-2024

**Gambar 1.2** Target Prevalensi Stunting dalam RPJMN 2020 - 2024

Berdasarkan grafik di atas (Gambar 1.2), terlihat bahwa prevalensi stunting ditargetkan untuk turun sekitar 2-3% setiap tahunnya. Namun, target prevalensi stunting di tahun 2020 - 2022 tidak tercapai apabila dibandingkan dengan hasil prevalensi stunting pada SSGI tahun 2020 hingga 2022 dengan nilai berturut – turut adalah 26,9%, 24,4%, 21,6%.

Gambar 1.3. adalah prevalensi balita stunting di setiap Provinsi di Indonesia berdasarkan hasil Studi Status Gizi Indonesia Tahun 2022 yang menunjukkan perbandingan prevalensi balita stunting di setiap provinsi dengan prevalensi balita stunting secara Nasional. Terdapat 18 provinsi dengan nilai prevalensi diatas angka Nasional sebesar 21,6 dimana 5 provinsi dengan angka prevalensi paling tinggi secara berturut-turut adalah provinsi Nusa Tenggara Timur, Sumatera Barat, Papua, Nusa Tenggara Timur dan Aceh. 16 provinsi lain yaitu 5 provinsi dengan angka prevalensi paling rendah secara berturut-turut adalah Bali, DKI Jakarta, Lampung, Kepulauan Riau dan D.I Yogyakarta.



Catatan : Data untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur didapatkan melalui perhitungan prediksi menggunakan metode Small Area Estimation (SAE) oleh BPS

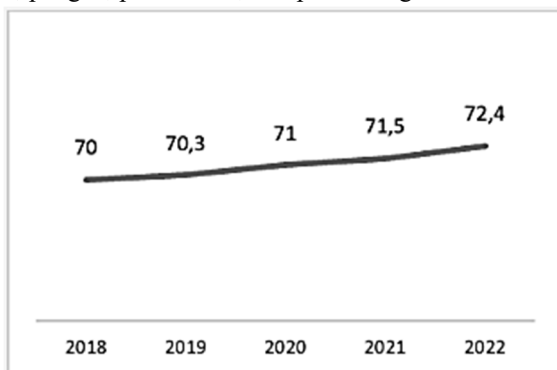
**Gambar 1.3** Prevalensi Balita Stunting Berdasarkan Provinsi – SSGI 2022

Tahun 2023 adalah tahun kelima pelaksanaan Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Pencegahan Stunting 2018 dan juga menjadi tahun kedua pelaksanaan Peraturan Presiden No.72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Pada tahun 2022, prevalensi stunting terus menunjukkan tren penurunan. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) yang dirilis oleh Kementerian Kesehatan bahwa pada tahun 2022, prevalensi stunting di Indonesia turun sebanyak 2,8% poin dibanding tahun 2021 dari 24,4% menjadi 21,6%. Meskipun mengalami penurunan, namun penurunan sebesar 2,8% poin kurang dari target yang ditetapkan, yaitu sebesar 3,4% per tahun. Dengan penurunan pada tahun 2022 sebesar 2,8% poin, maka untuk mencapai target di tahun 2024 prevalensi stunting harus dapat diturunkan sebesar 7,6% poin dalam 2 tahun ke depan. Hal ini tentu saja menjadi tantangan besar dalam pelaksanaan program dalam 2 tahun ke depan. Tahun 2022 juga menjadi tahun pemulihan pasca pandemi Covid-19 yang mulai terjadi di Indonesia pada tahun 2020–2021. Berbagai program dan kegiatan yang sempat terhenti pada periode tahun 2020–2021 mulai kembali dilaksanakan di lapangan. Ini tentu saja suatu pertanda baik bagi pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

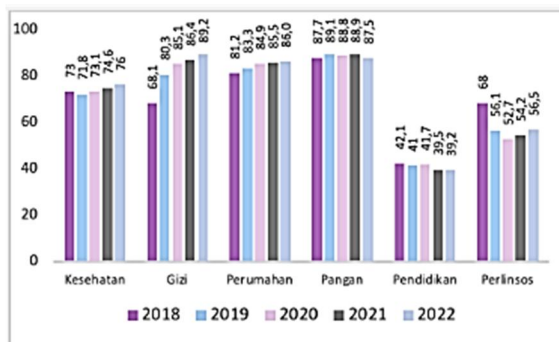
Masalah penanganan perkembangan stunting terus diupayakan pemerintah dengan selalu memantau tumbuh kembang anak. Percepatan penurunan stunting pada anak balita merupakan salah satu agenda utama pemerintah. Untuk mendukung pelaksanaan percepatan penurunan stunting, pemerintah telah menetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. Hal ini merupakan salah satu langkah penting dalam upaya untuk mencapai target nasional prevalensi stunting pada tahun 2024 sebesar 14 persen, sebagaimana terdapat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Suatu instrumen evaluasi dibutuhkan untuk mengetahui pencapaian dari berbagai upaya percepatan penurunan stunting.

Indeks Khusus Penanganan Stunting (IKPS) merupakan salah satu instrumen yang disusun untuk mengukur kinerja pelaksanaan program percepatan penurunan stunting di tingkat nasional hingga tingkat kabupaten/kota. Selain IKPS, terdapat instrumen lain yang juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja pelaksanaan program, yaitu

Survei Status Gizi tahunan yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan untuk mengetahui prevalensi stunting balita di Indonesia serta evaluasi kinerja pelaksanaan 8 Aksi Konvergensi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui pemerintah provinsi (BPS, 2022). Dalam konteks penanganan stunting, BPS (2021) mengembangkan sebuah indeks yang disebut “Indeks Khusus Penanganan Stunting (IKPS)” yang meliputi 6 (enam) dimensi yaitu kesehatan, gizi, perumahan, pangan, pendidikan, dan perlindungan sosial.



**Gambar 1.4** Hasil Indeks Khusus Penangan Stuntings tahun 2018 – 2021



**Gambar 1.5** Hasil Indeks Khusus Penangan Stunting tahun 2018 – 2021

Gambar 1.4 dan Gambar 1.5 menunjukkan bahwa dari tahun 2018 hingga 2022, terjadi kenaikan indeks sebesar 2,4 poin. Ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pelaksanaan program terkait dengan penurunan

stunting. IKPS disusun oleh 6 dimensi yang masing-masingnya disusun oleh satu atau lebih indikator sehingga total indikator penyusun IKPS sebanyak 11 Indikator.

Analisis regresi merupakan metode analisis statistika yang digunakan untuk mengetahui hubungan serta memodelkan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Secara umum analisis regresi linier dibagi menjadi dua yaitu regresi linier sederhana dan regresi linier berganda. Pada analisis regresi sederhana (*bivariat*) terdiri dari dua variabel yaitu variabel dependen dan variabel independen, dan analisis regresi berganda merupakan regresi yang memiliki satu variabel dependen dan beberapa variabel independen.

Regresi spasial merupakan hasil pengembangan dari metode regresi linier klasik. Pengembangan tersebut karena adanya pengaruh tempat atau spasial pada data yang dianalisis. Sehingga, jika terdapat data dengan efek spasial maka analisis yang digunakan adalah analisis regresi spasial. Sebab, jika menggunakan regresi linear sederhana ataupun berganda maka model yang dihasilkan kurang akurat dan menyebabkan kesimpulan yang kurang tepat karena asumsi error saling bebas tidak terpenuhi. Pada pemodelan regresi dengan efek spasial, maka harus disusun sebuah matriks pembobot spasial untuk mengetahui interaksi spasial yang terjadi antar wilayah satu dengan wilayah lainnya. Jika interaksi antar wilayah berdasarkan pada persentuhan sisi wilayah maka matriks pembobot spasial yang terbentuk adalah *rook contiguity*. Jika interaksi antar wilayah berdasarkan persentuhan titik sudut maka matriks pembobot spasial yang terbentuk adalah *bishop contiguity*. Sedangkan apabila interaksi antar wilayah merupakan gabungan dari persentuhan sisi wilayah dan titik sudut, maka matriks pembobot spasial yang terbentuk adalah *queen contiguity*.

Penelitian sebelumnya telah dilakukan oleh Anggun Yuliarum Qur'aini (2023) dengan judul "Pemodelan *Principal Component Regression Analysis* dari Faktor Penanganan Stunting saat Pandemi Covid-19 di Indonesia". Berdasarkan hasil penelitian didapatkan kesimpulan bahwa pada model regresi pada PCRA yang terbentuk, terlihat semua faktor memberikan pengaruh secara positif terhadap penanganan stunting di Indonesia saat pandemi melanda. Namun,

terdapat faktor yang paling besar pengaruhnya yaitu penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, dan Penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau bantuan pangan. Saran untuk penelitian selanjutnya adalah dapat melibatkan pembobot lokasi dalam penelitian agar menghasilkan model regresi untuk setiap lokasi.

Pada penelitian lainnya yang dilakukan oleh Vicky Alfina Nur Syafika (2023) yang berjudul “Implementasi *Support Vector Machine* (SVM) Dalam Penentuan Klasifikasi Indeks Khusus Penanganan Stunting Di Indonesia” dengan mengambil data IKPS beserta indikatornya pada tahun 2020. Hasil yang diperoleh yaitu mengklasifikasikan wilayah/provinsi menjadi 3 Kategori IKPS yaitu kategori IKPS Rendah, Sedang dan Tinggi. Pada wilayah dengan kategori IKPS Rendah. Hasil klasifikasi yang diperoleh yaitu 4 Provinsi dengan kategori indeks khusus penanganan stunting rendah, 21 Provinsi dengan kategori indeks khusus penanganan stunting sedang, dan 9 Provinsi dengan kategori indeks khusus penanganan stunting tinggi. Sedangkan indikator-indikator yang berpengaruh adalah penolong persalinan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan, ketidakcukupan pangan, Keluarga Berencana (KB) modern, Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), dan air minum layak.

Berdasarkan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya terkait pemodelan dan klasifikasi Indeks Penanganan Stunting (IKPS), peneliti merasa perlu untuk mengetahui cakupan sebaran data Indeks Penanganan Stunting (IKPS) di Indonesia pada tahun 2021. Melanjutkan penelitian terbaru yang dilakukan oleh Vicky Alfina Nur Syafika (2023), melalui penelitian ini ingin menganalisis secara lebih kompleks indikator mana yang berpengaruh signifikan dalam penetapan Indeks Khusus Penanganan Stunting (IKPS) dan menambahkan pengaruh efek lokasi/wilayah Provinsi di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemerintah sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan penanganan masalah stunting di Indonesia dan evaluasi terhadap wilayah/provinsi yang perlu untuk menjadi perhatian sehingga angka prevalensi Stunting di Indonesia sesuai dengan target yang diharapkan.



## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana eksplorasi data sebaran capaian IKPS provinsi di Indonesia pada tahun 2022?
2. Bagaimana hasil pengujian regresi linier berganda pada faktor-faktor yang mempengaruhi IKPS di Indonesia?
3. Apakah terdapat dependensi spasial pada faktor-faktor yang mempengaruhi IKPS di Indonesia ?
4. Apabila terdapat dependensi spasial, hasil pemodelan mana yang lebih baik untuk faktor-faktor yang mempengaruhi IKPS di Indonesia ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dan diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana sebaran capaian IKPS provinsi di Indonesia pada tahun 2022.
2. Mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh signifikan terhadap IKPS antar provinsi di Indonesia.
3. Mengetahui apakah terdapat terdapat dependensi spasial pada faktor-faktor yang mempengaruhi IKPS di Indonesia.
4. Menentukan pemodelan terbaik untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi IKPS di Indonesia.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1. Kontribusi Praktis**

Kontribusi praktis dapat digunakan sebagai pemberian gambaran nyata, secara riil atas praktik yang telah dilakukan. Adanya penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor signifikan untuk membantu penyusunan program penanganan stunting yang lebih terfokus dan sesuai dengan kondisi setiap provinsi, memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih efisien

### **2. Kontribusi Teoritis**

Kontribusi teoritis dapat digunakan sebagai sarana atau wadah yang memberikan edukasi atau wawasan bagi semua pihak yang memiliki

ketertarikan khusus pada bidang kesehatan. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan dan mendalam untuk memahami dinamika stunting di tingkat provinsi, sehingga memberikan sumbangan lebih lanjut bagi literatur ilmiah dan pemahaman kita tentang isu kesehatan masyarakat.

### 3. Kontribusi Kebijakan

Sebagaimana penelitian ini disusun dengan maksud dan tujuan, diharapkan dapat menjadi dasar informasi bagi pembuat kebijakan untuk merancang program intervensi dan kebijakan penanganan stunting yang lebih efektif di tingkat provinsi.

## **1.5 Batasan Masalah**

Data yang digunakan adalah data indeks khusus penanganan stunting di Indonesia yang meliputi 34 Provinsi pada tahun 2022 dengan 6 variabel indikator Indeks Khusus Penanganan Stunting (IKPS).